

Wacana Bernegara dan Perjuangan Bangsa

SETELAH 50 tahun merdeka sebagai bangsa dengan berbagai capaian dan kekurangannya, tantangan-tantangan apakah yang kini terbentang di hadapan kita? Itulah pertanyaan utama yang hendak dibicarakan dalam tulisan ini.

Untuk itu, pengalaman dan capaian-capaian dalam pasang-surut hidup bernegara-bangsa selama setengah abad tak boleh dibiarkan berlalu tanpa pemahaman. Dalam keterbatasannya, tulisan ini coba memberikan uraian yang cakupannya umum dan sifatnya sangat tentatif.

Pelajaran setengah abad

Dalam seperempat abad pertama perjalanan Indonesia, kemerdekaan boleh dikata bermakna membangun kepercayaan diri sebagai bangsa yang merdeka, yang berdaulat dalam mengelola negeri sendiri, dan bergaul sederajat di hadapan bangsa-bangsa lain. Untuk seperempat abad berikutnya, pemaknaannya adalah pemenuhan kebutuhan-kebutuhan material dasar: pangan, sandang, papan. Pendek kata, ideologi pembangunan menjadi upaya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dari bangsa yang merdeka.

Kedua tahap perkembangan bangsa tersebut telah memberikan kontribusinya sendiri. Penguatan identitas diri sebagai bangsa (di hadapan kolektivitas asing) telah dilakukan, sedangkan pemenuhan kebutuhan material juga telah diupayakan.

Pada tingkatnya sendiri, kedua capaian tersebut tentu harus dipersoalkan. Sudahkah

kesepakatan mendirikan dan mempertahankan eksistensi negara nasional serta limpahan material itu, memadai sebagai bekal untuk menghadapi tantangan-tantangan yang akan datang?

Untuk menjawab pertanyaan ini, dan berarti memasuki masalah utama yang dibicarakan dalam tulisan ini, tiga hal perlu dilakukan. Pertama, menyimak kembali pelajaran selama 50 tahun menjadi bangsa merdeka yang melakukan berbagai kegiatan bernegara. Kedua, mengenali *lebenswelt* (dunia kehidupan) kita saat ini sebagai bangsa. Ketiga, melakukan proyeksi agenda perjuangan ke depan, berdasarkan refleksi atas cita-cita kemerdekaan bangsa.

Kondisi seperempat abad pertama Indonesia merdeka telah memperoleh kritik yang tajam, bahkan falsifikasi. Untuk seperempat berikutnya, agaknya disadari bahwa pembangunan yang berkonotasi sekadar pertumbuhan ekonomi (dengan ukuran rata-rata jumlah kekayaan keseluruhan bangsa perkapita) memang tak memadai. Sebab, dimensi pemerataan (persentase pendapatan perkapita atas golongan-golongan penduduk) juga harus dipertimbangkan.

Mengukur keberhasilan pembangunan hanya dengan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan, memang belum memadai. Faktor kualitas hidup fisik (*physical quality of life*), kondisi lingkungan hidup manusia, bahkan kesinambungan pembangunan itu sendiri menjadi persoalan penting yang harus diperhatikan. Pengabaian

Mohammad Fajrul Falaakh

akan kualitas hidup manusia dan merusakkan kondisi lingkungan, justru mendorong timbulnya aneka krisis dan kemacetan-kemacetan dalam pembangunan.

Meskipun kesemua dimensi tersebut turut diperhitungkan, pembangunan yang demikian masih berwatak materialistik. Perhatian bahwa pusat utama pembangunan adalah manusia, kiranya belum dilakukan sungguh-sungguh. Kondisi kemanusiaan yang utuh dengan segala atribut dan kebutuhannya sering diabaikan, seperti tampak pada keengganan untuk menegakkan perlindungan atas hak-hak asasi manusia.

Akibatnya, pembangunan manusia Indonesia masih juga diletakkan dalam perspektif mengolah, menghasilkan dan memanfaatkan materi. Hal ini masih kuat dalam penyelenggaraan pendidikan, yang hanya menekankan segi ketrampilan dan teknik dalam berproduksi, yang kini disusul dengan gemuruh penguasaan ilmu-pengetahuan dan teknologi. Di tengah kecenderungan reifikasi (pembendaan) ini, pengembalian manusia ke pusat perhatian pembangunan justru merupakan keniscayaan.

Indonesia di tengah dunia

Menghadapi proses menuju rezim liberalisasi perdagangan dunia dengan GATT (*General Agreement on Trade and Tariffs*) dan WTO (*World Trade Organization*), tampak bahwa Indonesia tak dapat mengelak dari

tuntutan-tuntutan dan tantangan-tantangan baru. Persiapan yang selama ini terbangun, dengan segala kritik dan perbaikan yang ada, makin perlu ditinjau kembali secara seksama dan persiapan-persiapan baru harus dilakukan.

Indonesia akan terikat pada aturan main perdagangan yang bersifat internasional. Akibat-

kondisi rakyat pada umumnya menimbulkan keprihatinan yang mendalam.

Terutama hal ini harus dikaitkan dengan sempitnya akses rakyat banyak dalam pengambilan keputusan ekonomi-politik, perilaku negara dan birokrasi yang sering diskriminatif dan mendorong berkembangnya penguasaan-penguasaan sumberdaya ekonomi hanya di kalangan terbatas, berlangsungnya keterbukaan sekadar untuk

ra harus dihindari.

Cita-cita kita bernegara adalah untuk memakmurkan seluruh rakyat, bukan hanya untuk golongan-golongan yang terbatas atau kelompok yang dekat dengan penguasa.

Rezim ekonomi internasional juga mengharuskan negara agar mengurangi peran ekonomi-politiknya, sehingga peran langsung rakyat banyak harus dibuka. Ini mengharuskan dikembangkannya kultur otonomi individu sebagai warga yang merdeka. Masyarakat lantas dapat terlibat secara positif dalam iklim keterbukaan. Sebaliknya, keterbukaan harus diarahkan kepada pencapaian kesepakatan-kesepakatan baru dalam pengelolaan negara.

Di antara arah baru itu ialah meningkatkan peran negara dalam menjamin hak-hak warganya. Bukankah tak diinginkan bahwa negara berdiam diri melihat kekuatan-kekuatan modal menggilas warganya? Bukankah negara didirikan untuk melindungi segenap bangsa dengan mewujudkan keadilan sosial yang menyeluruh? Jika yang diinginkan adalah bangsa yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, agaknya perjuangan bangsa yang akan datang justru ditentukan oleh wacana yang berpusat kepada persoalan kemanusiaan.***

*) **Mohammad Fajrul Falaakh**, staf pengajar Fak Hukum UGM, Ketua Tanfidziyah PBNU. Tulisan ini pernah dipresentasikan dalam "Seminar Peringatan 50 Tahun Indonesia Merdeka", GMNI Cabang Yogyakarta, 12 Agustus 1995.

Mengukur keberhasilan pembangunan hanya dengan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan, memang belum memadai. Faktor kualitas hidup fisik (physical quality of life), kondisi lingkungan hidup manusia, bahkan kesinambungan pembangunan itu sendiri menjadi persoalan penting yang harus diperhatikan. Pengabaian akan kualitas hidup manusia dan merusakkan kondisi lingkungan, justru mendorong timbulnya aneka krisis dan kemacetan-kemacetan dalam pembangunan.

nya, pasar domestik dengan sekitar 200 juta penduduk harus dibuka, dan negara yang berdaulat tak bebas lagi untuk bertindak dan menentukan aturannya sendiri tanpa mengindahkan batasan-batasan internasional.

Sementara ketangguhan dan kemandirian aktor-aktor ekonomi swasta dalam negeri yang kini dominan masih harus dilihat secara seksama, proyeksi

keterbukaan, maupun ketidakjelasan gambaran masa depan yang hendak dituju bersama.

Agenda perjuangan

Kesemua itu harus ditanggulangi, jika diinginkan kemajuan-kemajuan yang benar-benar membawa bangsa ini semakin mandiri dan berdaulat. Pertama, akses rakyat banyak dalam pengambilan keputusan ekonomi-politik harus makin dibuka, dan perilaku diskriminatif nega-